



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut., M.M
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- 3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
- 4 Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
- 5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
- 6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

- 7 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 8 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 9 Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- 10 Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- 11 Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
- 12 Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
- 13 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 14 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 15 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
- 16 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 17 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 18 Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
- 19 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 20 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.



H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut., M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197004071998031013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.044.146
2	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	5
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

7	Terlaksananya Ketaatan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
8	Terlaksananya Ketaatan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100

12	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
13	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
14	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
16	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
17	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
18	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
19	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100

20	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
21	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
22	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
24	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Persen	100
25	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
26	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
27	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
28	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
29	Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Rupiah	7,3 T
30	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
31	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40

32	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
33	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
34	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
35	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
36	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
37	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
38	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
39	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
40	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
41	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

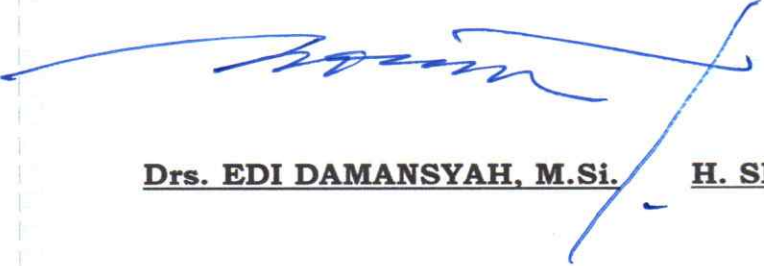
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

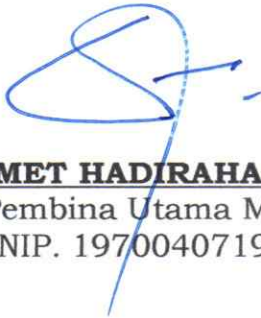
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	38.710.000.000	APBD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.900.000.000	APBD
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	27.875.000.000	APBD
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	49.640.000.000	APBD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.753.929.884	APBD
JUMLAH ANGGARAN		142.878.929.884	APBD

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.


H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197004071998031013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIARTO, SH., M.Si.

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut.,MM.

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah pada jabatan yang saya tempati secara berjenjang;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan yang saya tempati dan jajaran dibawah saya;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Penyajian Data Menjadi Informasi sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan untuk perumusan alternatif kebijakan;

7. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

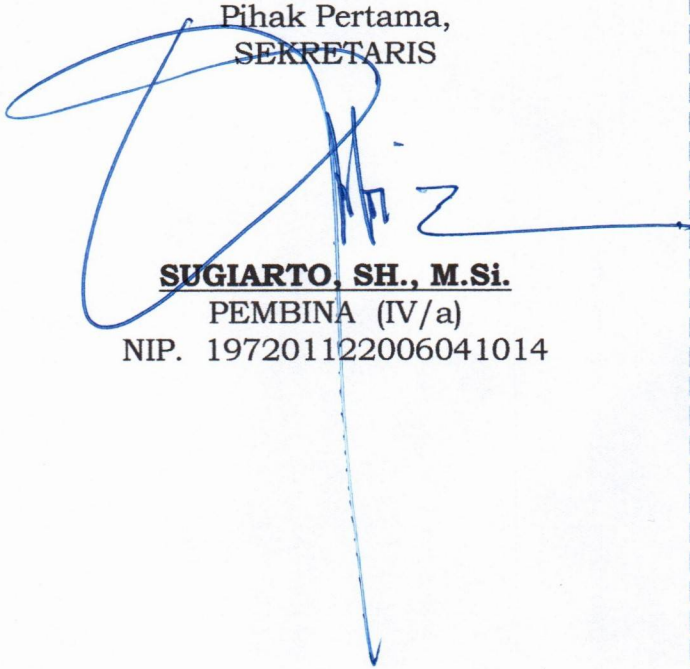
Kutai Kartanegara, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PARIWISATA



H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197004071998031013

Pihak Pertama,
SEKRETARIS



SUGIARTO, SH., M.Si.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197201122006041014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA 2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 3. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset 4. Rata-rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 5. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 6. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 7. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja 8. Pengelolaan Aset 9. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 10. Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 11. Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 100 92,67 100 30 100 100 100 100 100
2.	Meningkatnya Penyajian Data Menjadi Informasi	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan	Persen	100

sesuai dengan Tugas
dan fungsi jabatan

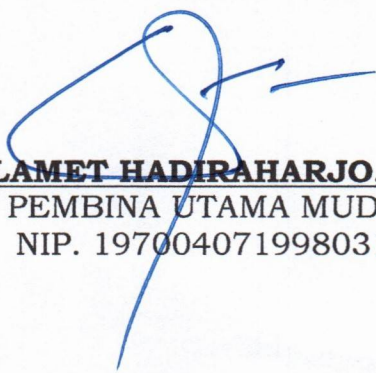
untuk perumusan alternatif
kebijakan

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

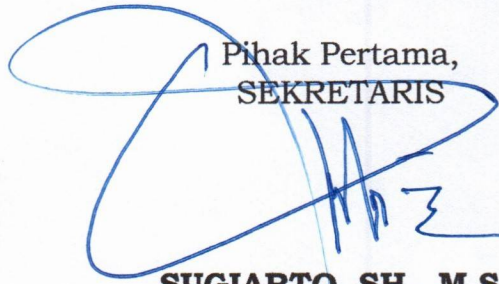
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	850.000.000,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.855.503748,00	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000,00	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.000.000,00	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.350.000.000,00	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.336.426.136,00	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.000.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		23.753.929.884,00	APBD

Kutai Kartanegara, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PARIWISATA


H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197004071998031013

Pihak Pertama,
SEKRETARIS


SUGIARTO, SH., M.Si.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197201122006041014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.JUANDA,SE**

Jabatan : **KASUBBAG UMUM,KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIARTO,SH.,M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan kepatuhan penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun;
2. Mewujudkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun;
3. Mewujudkan Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
4. Melaksanakan penginputan SIRUP;
5. Melaksanakan penginputan e-Pantau;
6. Melaksanakan Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah secara tepat waktu;
7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
8. Melaksanakan Penerapan Core Values ASN Berakhlak;
9. Menyusun Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
10. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

11. Mewujudkan Peningkatan Prestasi Inovasi ;
12. Melaksanakan Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor;
13. Melaksanakan Pelaporan P3DN;
14. Menyelenggarakan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani;
15. Melaksanakan peningkatan Inovasi Daerah;
16. Melaksanakan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ;
17. Melaksanakan peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
18. Melaksanakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok/vape dilingkungan kerja;
19. Meningkatkan capaian Kepuasan Masyarakat;
20. Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian untuk disajikan menjadi informasi;
21. Melaksanakan proses administrasi urusan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami, Penghargaan, pemberian Sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
22. Melaksanakan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu)
23. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sub kegiatan pada sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
24. Menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
25. Melaksanakan penilaian kinerja jabatan pelaksana;

26. Menyelenggarakan pelaksanaan dan penyusunan laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas/Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan;
27. Melaksanakan Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD;
28. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
29. Meningkatkan Pengamanan Aset;
30. Meningkatkan Tata Kelola Aset;
31. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah;
32. Menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja;
33. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
34. Melaksanakan Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
35. Melaksanakan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai;
36. Menyelenggarakan penyusunan Dokumen SPIP urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan Dinas Pariwisata;
37. Menyelenggarakan penyusunan dokumen manajemen resiko urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian serta Dinas Pariwisata;
38. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 12 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris,

SUGIARTO,SH.,M.Si

Pembina - IV/a

NIP. 197201122006041014

Pihak Pertama,
**Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian,**

H.JUANDA,SE

Penata Tk. I - III/d

NIP. 196808142003121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mewujudkan kepatuhan penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Jumlah LHKPN yang disampaikan per tanggal 31 Maret setiap tahun	Dokumen	1
2.	Mewujudkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Jumlah Bukti Lapor SPT Tahunan yang disampaikan per 31 Maret 2024	Dokumen	1
3.	Mewujudkan Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah Dokumen SKP yang disampaikan paling lambat akhir bulan Februari 2024	Dokumen	1
4.	Melaksanakan penginputan SIRUP	Jumlah Sub Kegiatan yang telah diinput serta diumumkan paket pengadaannya pada aplikasi SIRUP per akhir Februari 2024	Sub Kegiatan	12
5.	Melaksanakan penginputan e-Pantau	Jumlah sub kegiatan yang diinput dalam e-Pantau dan telah terverifikasi per tanggal 10 setiap bulan	Sub Kegiatan	12
6.	Melaksanakan Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah secara tepat waktu	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disampaikan per semester	Laporan	4
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselesaikan	Dokumen	1
8.	Melaksanakan Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Jumlah kegiatan Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Kegiatan	7
9.	Menyusun Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Perjanjian Kinerja yang tersusun pada Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	19

10.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Kegiatan	1
11.	Mewujudkan Peningkatan Prestasi Inovasi	Terlaksananya kegiatan proses Peningkatan Prestasi Inovasi	Kegiatan	1
12.	Melaksanakan Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Terselenggaranya kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Kegiatan	1
13.	Melaksanakan Pelaporan P3DN	Jumlah Sub Kegiatan yang telah dilakukan pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Sub Kegiatan	12
14.	Menyelenggarakan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Jumlah dokumen pendukung Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1
15.	Melaksanakan peningkatan Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen pendukung Indeks Inovasi Daerah	Dokumen	1
16.	Melaksanakan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen pendukung Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Dokumen	1
17.	Melaksanakan peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Dokumen	1
18.	Melaksanakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok/vape dilingkungan kerja	Jumlah dokumen pernyataan komitmen untuk tidak merokok/vape dilingkungan kerja	Dokumen	19
19.	Meningkatkan capaian Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen pendukung pencapaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang diinput dalam Aplikasi Survey Kukar	Dokumen	1
20.	Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian untuk disajikan menjadi informasi	Jumlah dokumen data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang dikumpulkan dan dihimpun	Dokumen	3

21.	Melaksanakan proses administrasi urusan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami, Penghargaan, pemberian Sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian)	Jumlah kegiatan proses pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kegiatan	18
-----	--	--	----------	----

22.	Melaksanakan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu)	Jumlah kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	Kegiatan	16
23.	Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sub kegiatan pada sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian	Jumlah sub kegiatan pada sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi	Sub Kegiatan	12
24.	Menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disusun	Dokumen	2
25.	Melaksanakan penilaian kinerja jabatan pelaksana	Jumlah Dokumen laporan penilaian kinerja pelaksana	Dokumen	18
26.	Menyelenggarakan pelaksanaan dan penyusunan laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas/Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas/Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan	Dokumen	24

27.	Melaksanakan Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Dokumen	2
28.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 Tahun terakhir	Dokumen	1
29.	Meningkatkan Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Dokumen	1
30.	Meningkatkan Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Dokumen	1
31.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Dokumen	1
32.	Menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja	Jumlah dokumen menyusun ABK	Dokumen	1
33.	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah dokumen pendidikan dan pelatihan pegawai	Dokumen	1
34.	Melaksanakan Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi	Dokumen	1
35.	Melaksanakan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan	Dokumen	4

	pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai			
36.	Menyelenggarakan penyusunan Dokumen SPIP urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan Dinas Pariwisata	Jumlah laporan SPIP urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan Dinas Pariwisata yang disusun secara tepat waktu	Dokumen	1
37.	Menyelenggarakan penyusunan dokumen manajemen resiko urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian serta Dinas Pariwisata	Jumlah dokumen manajemen resiko urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian serta dinas pariwisata yang disusun	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 12 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris,

SUGIARTO, SH., M.Si

Pembina - IV/a

NIP. 197201122006041014

Pihak Pertama,
**Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian,**

H. JUANDA, SE

Penata Tk. I - III/d

NIP. 196808142003121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. RIDHA FATRIANTA, S.STP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut, M.M**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Bidang yang Saya pimpin.
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara.
3. Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
4. Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP.
5. Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau.
6. Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD.
7. Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan).
8. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah.
9. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
10. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP.
11. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana.
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.
13. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape.

14. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan Pariwisata, pemberdayaan masyarakat wisata, serta pengembangan daya tarik wisata dan usaha Pariwisata.
15. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata Daerah, pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten Daerah, pengelolaan destinasi pariwisata Daerah, dan penetapan tanda daftar usaha Pariwisata Daerah.
16. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan Pariwisata, pemberdayaan masyarakat wisata, serta pengembangan daya tarik wisata dan usaha Pariwisata.
17. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

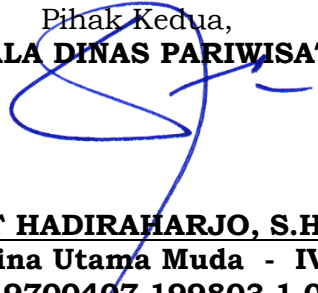
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PARIWISATA


H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut, M.M
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19700407 199803 1 013

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA**


M. RIDHA FATRIANTA, S.STP, M.Si
Pembina - IV/a
NIP. 19840609 200212 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	500.000
2.	Terselesaikanya tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN dan Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Jumlah laporan LHKPN dan SPT Pertanggal 31 Maret 2023	Laporan	2
3.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah dokumen SKP	Dokumen	1
4.	Terselesaikanya kepatuhan input SIRUP	Jumlah dokumen	Dokumen	1
5.	Terselesaikanya kepatuhan input E Pantau	Jumlah dokumen	Dokumen	1
6.	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Jumlah dokumen	Dokumen	1
7.	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Jumlah dokumen	Dokumen	1
8.	Terlaksananya usulan rencana kerja bidang Pengembangan	Jumlah dokumen	Dokumen	6

	Destinasi Pariwisata dan Usaha Pariwisata			
9.	Terselesaikannya ketersediaan Dokumen Manajemen Resiko	Jumlah dokumen	Dokumen	1
10.	Tersedianya kawasan tanpa asap rokok	Jumlah kawasan tanpa rokok	ruang	1
11.	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Dokumen yang di tugaskan oleh atasan	Laporan	10

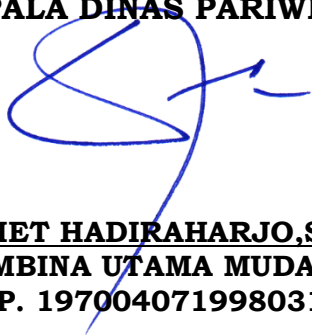
**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	49.640.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		49.640.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PARIWISATA



H.SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut, MM
PEMBINA UTAMA MUDA-IV/c
NIP. 197004071998031013

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA**



M. RIDHA FATRIANTA, S.STP, M.Si
PEMBINA - IV/a
NIP. 198406092002121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. TRIYATMA

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut. MM

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Melaksanakan Pendataan Jumlah kunjungan Wisatawan;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
3. Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
4. Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau;
5. Penerapan Core Values ASN Berakhlak;
6. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana;
7. Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan;
8. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
9. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata;
10. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata;

11. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis Pariwisata Daerah;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pemasaran Pariwisata yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
13. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata;
14. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan;
15. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
16. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang;
17. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. KUTAI KARTANEGARA,

H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut. MM

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19700407 199803 1 013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA

Drs. TRIYATMA

Penata TK. I / III d
NIP. 19660612 199303 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Melaksanakan Pendataan Jumlah kunjungan Wisatawan;	Terlaksananya Pendataan Jumlah kunjungan Wisatawan	Pengunj ng	1,808,979
2.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Terlaksananya Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun 2)Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Laporan	1
3.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Laporan	1
4.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Terlaksananya Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Kegiatan	1
5.	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Terlaksananya Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Kegiatan	4
6.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Terlaksananya Penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Kegiatan	11
7.	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Melaksanakan Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Dokumen	1
8.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Dokumen	1

9.	Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata	Terlaksananya penyajian data menjadi informasi urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata	Dokumen	3
10.	Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata	Kegiatan	3
11.	Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis Pariwisata Daerah	Terlaksananya Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis Pariwisata Daerah	Dokumen	3
12	Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pemasaran Pariwisata yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip	Terlaksananya pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pemasaran Pariwisata yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip	Dokumen	21
13	Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata	Laporan	4

	kemitraan Pariwisata			
14	Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan	Terlaksananya Pelaksanaan dan Laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	10
15	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Terlaksananya Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Laporan	1
16	Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang	Terlaksananya Pemberian Penilaian kinerja bawahan secara berjenjang	Orang	20
17	Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya	Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya	Persen	100

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. KUTAI KARTANEGARA,

H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut. MM

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19700407 199803 1 013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA

Drs. TRIYATMA

Penata TK. I / III d
NIP. 19660612 199303 1 015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZIKRI UMULDA, SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIARTO, SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melakukan Peningkatan Aktifitas Ekonomi Kreatif;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
3. Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
4. Melaksanakan Kepatuhan Input E-Pantau;
5. Melakukan Penerapan Core Values ASN Berakhlak;
6. Membuat dan Menyusun Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana;
7. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;
8. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;

9. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana (Zona/ Ruang / Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah; dan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif;
10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;
11. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang;
12. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan;
13. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
14. Melaksanakan Kepatuhan Input SIRUP;
15. Melaksanakan Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PARIWISATA

SUGIARTO, SH., M.Si

Pembina Tingkat I – (IV/b)

NIP. 197201122006041014

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF**

ZIKRI UMULDA, SH

Penata - (III/c)

NIP. 198405032006041004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Kreatif;	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100
2.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Persentase Jumlah Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 100% dan SPT tahunan per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4.	Melaksanakan Kepatuhan Input E-Pantau;	Persentase Jumlah laporan input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
5.	Melakukan Penerapan Core Values ASN Berakhlak;	Persentase Jumlah laporan Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
6.	Membuat dan Menyusun Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana;	Persentase Jumlah laporan penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan	Persen	100

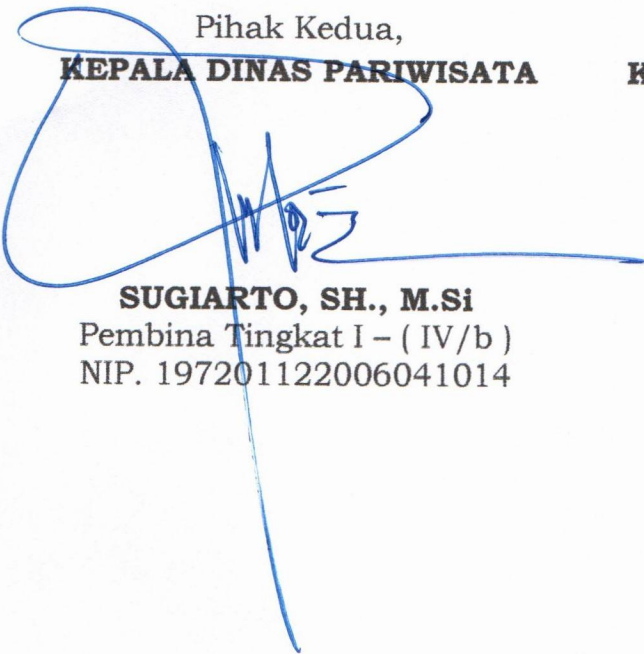
NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
7.	Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;	Persentase Jumlah penyajian data menjadi informasi urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif	Persen	100
8.	Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;	Persentase Jumlah kegiatan Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100
9.	Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana (Zona/ Ruang / Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah; dan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif;	Persentase Jumlah laporan Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100

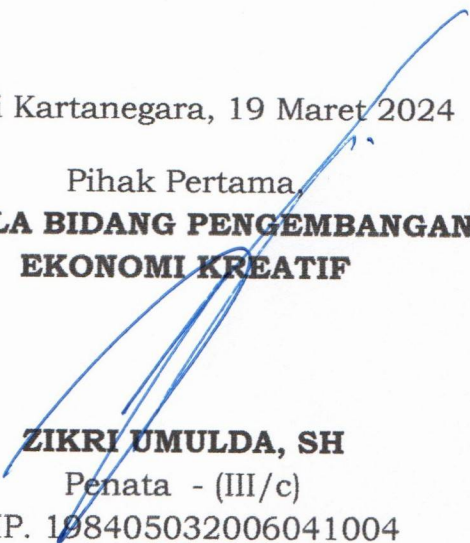
NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
10.	Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;	Persentase Jumlah laporan Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100
11	Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang;	Persentase Jumlah laporan	Persen	100
12	Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan;	Persentase Jumlah laporan	Persen	100
13	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
14	Melaksanakan Kepatuhan Input SIRUP;	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Februari setiap tahun	Persen	100
15	Melaksanakan Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan.	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100

Kutai Kartanegara, 19 Maret 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PARIWISATA

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF**


SUGIARTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I - (IV/b)
NIP. 197201122006041014


ZIKRI UMULDA, SH
Penata - (III/c)
NIP. 198405032006041004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANTONI KUSBIANTORO, SSTP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN INDUSTRI PARIWISATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut.,MM**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

1. Meningkatkan kunjungan wisata;
2. Meningkatkan aktifitas ekonomi kreatif;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan aparatur negara;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampain Sasaran Kinerja Pegawai(SKP);
5. Mewujudkan kepatuhan input SIRUP;
6. Mewujudkan kepatuhan input E Pantau;
7. Mewujudkan kepatuhan penyampian usulan RKBMD;
8. Mewujudkan penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke pelaksana;
9. Mewujudkan ketersediaan Dokumen Manajemen Resiko;
10. Melaksanakan Tata kelola Arsip Daerah;
11. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
12. Mewujudkan kawasan tanpa rokok/vape;

13. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, usaha Pariwisata serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. Mengkoordinasikan, Memonitoring dan mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif; pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar;
15. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, usaha Pariwisata serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PARIWISATA



H.SLAMETHADIRAHARJO, S.Hut, MM
PEMBINA UTAMA MUDA -IV/c
NIP. 197004071998031013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PEMBINAAN INDUSTRI PARIWISATA



ANTONI KUSBIANTORO, S.STP
PENATA TK. I-III/d
NIP. 198006202000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Event yang dilaksanakan	Orang	750.000
2	Terlaksananya aktifitas ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	3
3	Terselesaikanya tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN dan Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Jumlah laporan LHKPN dan SPT Pertanggal 31 Maret 2023	Laporan	2
4	Tersusunnya Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Jumlah dokumen Perjanjian kinerja	Dokumen	18
5	Terselesaikanya tingkat kepatuhan penyampain Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah dokumen SKP	Dokumen	1
6	Terselesaikanya kepatuhan input SIRUP	Jumlah dokumen	Dokumen	1
7	Terselesaikanya kepatuhan input E Pantau	Jumlah dokumen	Dokumen	5
8	Terlaksananya kepatuhan penyampian usulan RKBMD	Jumlah dokumen	Dokumen	1
9	Terlaksananya usulan rencana kerja bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kerja bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	5
10	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Jumlah dokumen	Dokumen	1
11	Terselesaikannya ketersediaan Dokumen Manjemen Resiko	Jumlah Dokumen	Dokumen	1

12	Tersedianya kawasan tanpa asap rokok	Jumlah kawasan tanpa rokok	ruang	3
13	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Dokumen yang di tugaskan oleh atasan	Laporan	10

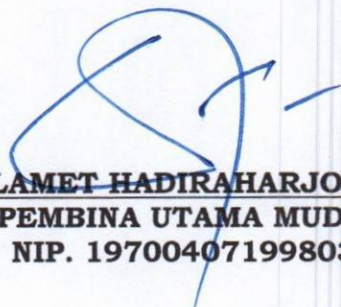
**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	27.875.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		27.875.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PARIWISATA



H.SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut, MM
PEMBINA UTAMA MUDA-IV/c
NIP. 197004071998031013

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
PEMBINAAN INDUSTRI PARIWISATA**



ANTONI KUSBIANTORO, SSTP
PENATA TK. I-III/d
NIP. 198006202000121001